

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Obyek/ Subyek Penelitian

Objek penelitian merupakan lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Wilayah Kabupaten Banjarnegara, dengan menggunakan data PDRB Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tahun 2011-2015.

Sedangkan subyek penelitian merupakan target populasi atau sampel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dari *stakeholder* terkait seperti BAPPEDA Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pertanian Kabupaten Banjarnegara, DPPKAD, serta Setda Kabupaten Banjarnegara.

B. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu:

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan melakukan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini dicatat secara sistematis dan dikutip secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian. Data yang digunakan yaitu data PDRB Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi

Jawa Tengah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjarnegara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk *time series* daalam waktu 5 tahun dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

2. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dan segera oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan penyebaran kuisisioner kepada responden yang merupakan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, observasi, wawancara dan kuisisioner.

1. Metode Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dan studi pustaka digunakan untuk mengetahui data PDRB Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 melalui informasi dari instansi-instansi terkait, buku referensi maupun jurnal-jurnal ekonomi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan dengan mengamati serta mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan setelah melakukan observasi lapangan yang dilakukan peneliti dengan tujuan untuk mengkaji ulang dan memastikan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Selanjutnya hasil observasi dan wawancara yang telah terkumpul dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan kuisisioner.

4. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner merupakan deretan pertanyaan maupun pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam penelitian ini, metode kuisisioner (angket) digunakan untuk memperoleh data untuk menentukan sub sektor yang berpotensi dari sektor basis yang telah ditentukan.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel secara sengaja. Sampel yang dipilih merupakan *stakeholder* dari wilayah terkait yang paham dan berkompeten dengan penelitian yang diambil peneliti. Adapun sampel yang dianggap paham serta kompeten yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi terhadap seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penyusunan kebijakan Bupati.

2. Kasi Pertanian dan bangan BAPPEDA mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan dalam bidang produktivitas pertanian.
3. Kasi Perencanaan Anggaran DPPKAD mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD serta penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan perencanaan APBD.
4. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok membantu kepala pemerintah setempat dalam kewenangan desentralisasi di bidang pertanian yang meliputi pengembangan dan pembangunan pertanian.

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Potensi Ekonomi

Untuk mengetahui besarnya potensi ekonomi diukur melalui jumlah kontribusi yang diberikan masing-masing sektor terhadap pendapatan daerah masing-masing Kabupaten. Besarnya kontribusi sektor ekonomi tersebut dapat dihitung dengan besarnya jumlah PDRB yang dihasilkan.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah nilai tambah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua kegiatan perekonomian dalam kurun waktu satu tahun. PDRB merupakan

indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat berdasarkan harga konstan. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

3. Sektor Unggulan

Sektor unggulan merupakan sektor yang memiliki peranan besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

4. Sektor Basis dan Sektor Non-Basis

Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi untuk bisa mengekspor barang dan jasanya keluar batas perekonomian daerahnya. Sektor ekonomi daerah dikatakan mempunyai sektor basis apabila nilai $LQ > 1$. Sedangkan sektor non basis adalah sektor yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Jika nilai $LQ < 1$ dari suatu sektor ekonomi artinya sektor tersebut merupakan sektor non basis.

5. Sektor-sektor ekonomi

Sektor-sektor ekonomi merupakan sektor yang terdapat di Daerah yang memberikan kontribusi dalam mempengaruhi nilai pendapatan daerah. Adapun sektor-sektor ekonomi tersebut yaitu: pertanian, pertambangan & penggalan, industri pengelolaan, listrik; gas dan air bersih, bangunan, perdagangan; hotel dan restoran, pengangkutan

& komunikasi, keuangan; persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa.

6. Subsektor Unggulan

Subsektor unggulan merupakan komoditi yang memiliki peranan besar dibandingkan dengan komoditi lainnya dalam suatu sektor tertentu.

F. Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis data, yaitu:

1. Metode *Location Quotient* (LQ)

Location Quotient (LQ) atau kuosien lokasi adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2014: 82). LQ merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan (Arsyad, 2015: 390). Tarigan (2014) mengungkapkan bahwa ada banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umum adalah nilai tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Berikut ini yang digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{x_i}{PDRB_i}}{\frac{X_i}{PDRB}}$$

Di mana:

x_i = Nilai tambah sektor i di suatu daerah

$PDRB_i$ = Produk domestik regional bruto daerah tersebut

X_i = Nilai tambah sektro i daerah yang menjadi acuan

$PDRB$ = Produk domestik regional bruto daerah acuan

Interprestasi dari hasil perhitungan LQ adalah:

- a. Apabila nilai $LQ = 1$, maka peranan sektor tersebut di daerah yang diteliti sama dengan peranan sektor di daerah acuan.
- b. Apabila nilai $LQ > 1$, maka peranan sektor tersebut merupakan sektor unggulan atau disebut juga sektor basis di daerah yang diteliti.
- c. Apabila nilai $LQ < 1$, maka peranan sektor tersebut bukan termasuk sektor potensial ekspor di daerah tersebut atau disebut juga bahwa sektor tersebut merupakan sektor non basis.

Sehingga dapat disimpulkan, apabila nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial yang harus dikembangkan sebagai penggerak roda pertumbuhan dan pembangunan ekonoi daerah yang bersangkutan. *Location Question* (LQ) digunakan sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah

ada, LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Akan lebih tepat untuk melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk diekspor atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi atau bantuan khusus oleh daerah yang bersangkutan melebihi yang diberikan daerah-daerah lainnya (Tarigan, 2014: 83).

2. Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP merupakan teknik pengambilan keputusan matematis yang mempertimbangkan aspek kualitatif maupun kuantitatif dalam pengambilan keputusan, selain itu faktor yang diperhatikan dalam metode AHP yaitu faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. Sumber : (AHP, Bambang Permadi)

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yang terdiri dari :

- a. ***Reciprocal Comparison***, yaitu pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya harus memenuhi syarat resiprokal yaitu jika A lebih disukai dari B dengan skala "x", maka B lebih disukai dari A dengan skala "1/x".
- b. ***Homogeneity***, yaitu preferensi seseorang harus bisa dinyatakan dengan skala terbatas atau dengan kata lain elemen- elemennya dapat

dibandingkan satu sama lain. Jika aksioma ini tidak dapat dibandingkan maka aksioma tersebut dianggap tidak dapat dipenuhi, sehingga kriteria-kriteria yang dibandingkan tersebut bersifat tidak homogenous dan harus dibentuk suatu 'cluster' (kelompok kriteria-kriteria) yang baru.

c. *Independence*, yaitu preferensi diasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif- alternatif yang ada melainkan oleh objek secara keseluruhan. Hal tersebut menjelaskan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas, artinya perbandingan antara kriteria-kriteria dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh kriteria-kriteria dalam level di atasnya.

d. *Expectations*, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka pengambil keputusan dianggap tidak memakai seluruh kriteria atau objek yang tersedia sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap.

Adapun prinsip dasar dalam perhitungan AHP, yaitu:

a. Dekomposisi

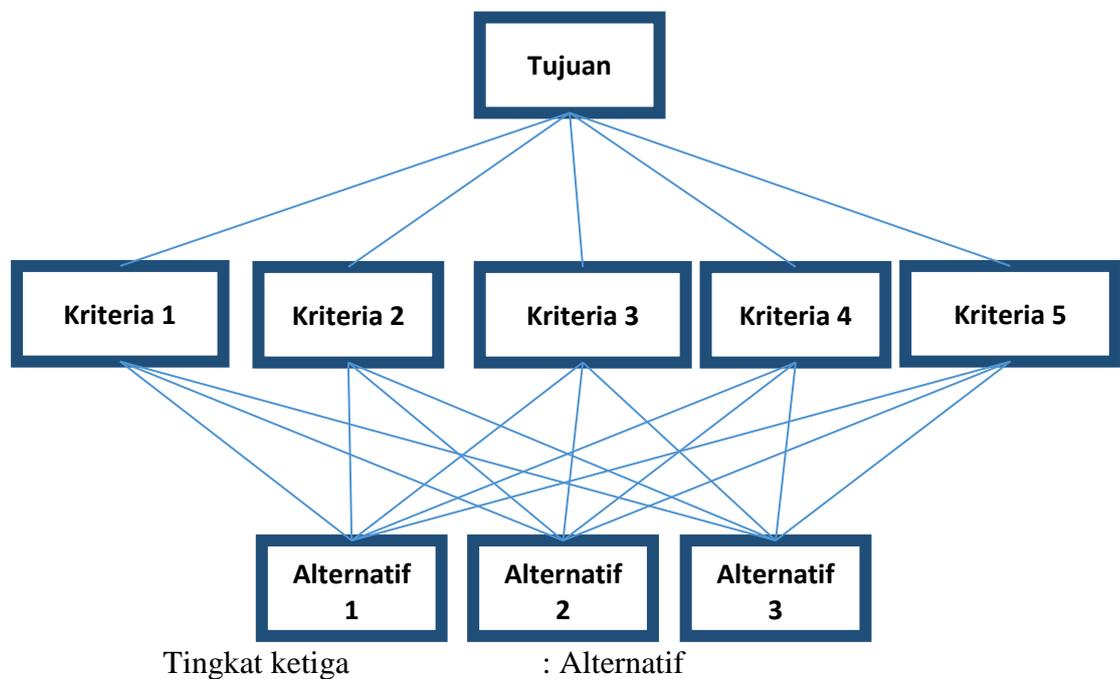
Dalam tahapan ini masalah yang akan diteliti dibagi menjadi bagian-bagian dalam sebuah hierarki. Tujuan pembuatan hierarki adalah untuk mendefinisikan masalah dari yang umum sampai yang khusus. Dalam keadaan yang paling sederhana struktur

hierarki tersebut berfungsi untuk membandingkan antara tujuan, kriteria, dan level alternatif. Level paling atas dari hierarki merupakan tujuan dari penyelesaian masalah dan hanya ada satu elemen. Level berikutnya memiliki beberapa elemen sebagai kriteria yang masing-masing kriteria tersebut dapat dibandingkan antara satu dan lainnya, memiliki perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Jika perbedaannya terlalu besar maka harus dibuat level yang baru.

Bentuk struktur dekomposisi yakni :

Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)

Tingkat kedua : Kriteria – kriteria



Gambar 3. 1

Struktur Hierarki AHP

b. *Comparative Judgement*

Comparative Judgement sering juga disebut sebagai penilaian kriteria atau alternative. Dalam tahapan ini akan dibuat suatu perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dalam hierarki dengan tujuan akan dihasilkan sebuah skala kepentingan dari masing-masing elemen. Penialian yang dilakukan akan menghasilkan sebuah angka yang selanjutnya akan dibandingkan untuk menghasilkan sebuah prioritas. Skala angka yang digunakan yaitu dari 1-9 yang kemudian disusun untuk mendapatkan perbandingan berpasangan. Adapun definisi skala perbandingan yang digunakan, yaitu:

Tabel 3. 1

Skala Perbandingan AHP

Skala	Keterangan
1	Tujuan yang satu dengan yang lainnya sama penting
3	Tujuan yang satu sedikit lebih penting (agak kuat) dibanding tujuan yang lainnya.
5	Tujuan yang satu sifatnya lebih penting (lebih kuat pentingnya) dibanding tujuan yang lainnya
7	Tujuan yang satu sangat penting dibanding tujuan yang lainnya
9	Tujuan yang satu ekstrim pentingnya dibanding tujuan yang lainnya
2, 4, 6, 8	Nilai tengah di antara dua nilai skor penilaian diatas

c. Sintesa Prioritas

Sintesa prioritas dilakukan setelah mendapatkan data dengan melakukan pengisian kuisioner tentang skala perbandingan diatas.

Hal-hal yang dilakukan dalam langkah ini yaitu:

- 1) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks pada masing-masing kriteria.

Tabel 3. 2
Penjumlahan Tiap Kolom

	A1	A2	An
A1	A11	A12	A1n
A2	A21	A22	A2n
An	An1	An2	Ann
Jumlah	A	B	C

- 2) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh nilai normalitas matriks.
- 3) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.

Tabel 3. 3
Matriks Nilai Kriteria

	A1	A2	An	Jumlah	Prioritas
A1	A11/a	A12/b	A1n/c	J	J/n
A2	A21/a	A22/b	A2n/c	K	K/n
An	An1/a	An2/b	Ann/c	L	L/n

d. Mengukur Konsistensi

Mengukur konsistensi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Suatu kriteria dikatakan konsisten jika nilai CI kurang dari

10%. Beberapa langkah yang dilakukan dalam mengukur konsistensi, yaitu:

- 1) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relative elemen kedua, dan seterusnya.

Tabel 3. 4
Matriks Perkalian

	A1	A2	An
A1	(J/n)A11	(J/n)A12	(J/n)A1n
A2	(K/n)A21	(K/n)A22	(K/n)A2n
An	(L/n)An1	(L/n)An2	(L/n)Ann

- 2) Jumlahkan setiap baris

Tabel 3. 5
Matriks Penjumlahan Baris

	A1	A2	An	Jumlah baris
A1	(J/n)A11	(J/n)A12	(J/n)A1n	O
A2	(K/n)A21	(K/n)A22	(K/n)A2n	P
An	(L/n)An1	(L/n)An2	(L/n)Ann	Q

- 3) Hasil dari setiap baris dibagi dengan elemen relative yang bersangkutan
- 4) Jumlahkan hasil bagi diatas dengan banyaknya elemen yang ada. Yang disimbolkan dengan " π "
- 5) Menghitung rasio *Consistency Index* (CI) dengan rumus:

$$CI = (\pi \text{ maks}-n)/n$$

n : banyaknya elemen

6) Menghitung Rasio Konsistensi (CR) dengan rumus:

$$CR = CI/IR$$

CR : *consistency Ratio*

CI : *Consistency Index*

IR : *Index Random Consistency*

7) Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilai CR lebih dari 10% atau 0.1 maka nilai *judgement* harus diperbaiki. Namun, jika nilai CR sama dengan nol atau kurang dari 10% maka hasil nilai *judgement* benar.

e. Kelebihan dan Kekurangan model AHP

Kelebihan metode ini ialah sederhana dan tidak banyak asumsi tetapi lebih disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarki. Metode ini cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat strategis dan makro. Kekuatan AHP terletak pada struktur hirarkinya yang memungkinkan seseorang memasukkan semua faktor-faktor penting, baik nyata maupun abstrak, kemudian mengaturnya dari atas kebawah mulai dari yang paling penting ketingkat yang berisi alternatif, untuk dipilih mana yang terbaik AHP ialah salah satu bentuk pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model model sebelumnya.

Personal yang menguasai permasalahan yang sedang diteliti (*expert*) sangat dibutuhkan dalam model AHP untuk didapat persepsi atau penilaiannya. Penentuan seseorang sebagai ahli, bukan berarti orang tersebut harus pintar, jenius ataupun bergelar doktor, tetapi mengacu kepada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau kepentingan terhadap masalah tersebut. Para *expert* dalam melakukan analisisnya dengan menggunakan *personal judgement* berdasarkan pengetahuan atau kemampuan dan pengalamannya yang diperkaya dengan data sekunder dari literatur maupun opini pendapat masyarakat.

Adapun kelebihan-kelebihan lain dari model AHP yaitu sifatnya yang fleksibel, demokratis dan dalam perhitungannya tidak terlalu rumit. Sifat fleksibel yang dimaksudkan tersebut yaitu mampu mencakup banyak permasalahan dengan tujuan dan kriteria yang beragam (*multiobjectives and multicriterias*). Tujuan yang berbeda dapat dimasukkan dalam suatu level dan satu hirarki dan hirarkinya sendiri sangat fleksibel dan peka terhadap perubahan. Sifat yang demokratis tersebut berkaitan dengan kepentingan politik. Dalam proses perencanaan dengan menggunakan AHP, masyarakat berkemungkinan turut serta dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses pembuatan hirarki dan pengisian kuisisioner bersama-sama aparat pemerintah. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pembangunan tidak hanya bersifat *top down* tetapi juga *bottom up*.

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki AHP yang telah disebutkan diatas, model AHP tidak luput dari kelemahan. Ketergantungan model ini pada input yaitu persepsi ahli akan membuat hasil akhir menjadi tidak ada artinya apabila ahli memberikan penilaian yang keliru. Kondisi ini ditambah dengan belum adanya kriteria yang jelas mengenai seorang ekspert atau ahli. Agar membuat model AHP ini diterima, perlu meyakinkan masyarakat untuk menganggap persepsi ahli dapat mewakili masyarakat atau sebagian besar masyarakat. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki model AHP tersebut dirangkum kedalam tabel dibawah ini berikut:

Tabel 3. 6
Kelebihan dan Kekurangan Model AHP

Kelebihan Model AHP	Kekurangan Model AHP
<ul style="list-style-type: none"> • Model AHP ialah memasukkan data kualitatif dan diolah menjadi kuantitatif. • AHP mempertimbangkan analisis permasalahan yang melibatkan banyak pelaku (<i>multi actor</i>), banyak kriteria (<i>multi criteria</i>) yang bisa dimasukkan dan banyak obyek (<i>multi objective</i>). • AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis, proses ini bergantung pada imajinasi pengalaman dan pengetahuan untuk menyusun hirarki suatu masalah dan bergantung pada logika intuisi dan pengalaman untuk memberi pertimbangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit dikerjakan secara manual terutama bila matriksnya yang terdiri dari tiga elemen atau lebih, sehingga harus dibuat suatu program komputer untuk memecahkannya. • Belum adanya batasan <i>expert</i> sebagai responden pada masing-masing kasus juga dapat melemahkan metode ini, tetapi hal ini diantisipasi dengan pemberian bobot yang berbeda dalam tabulasi kuisioner hasil isisan responden.

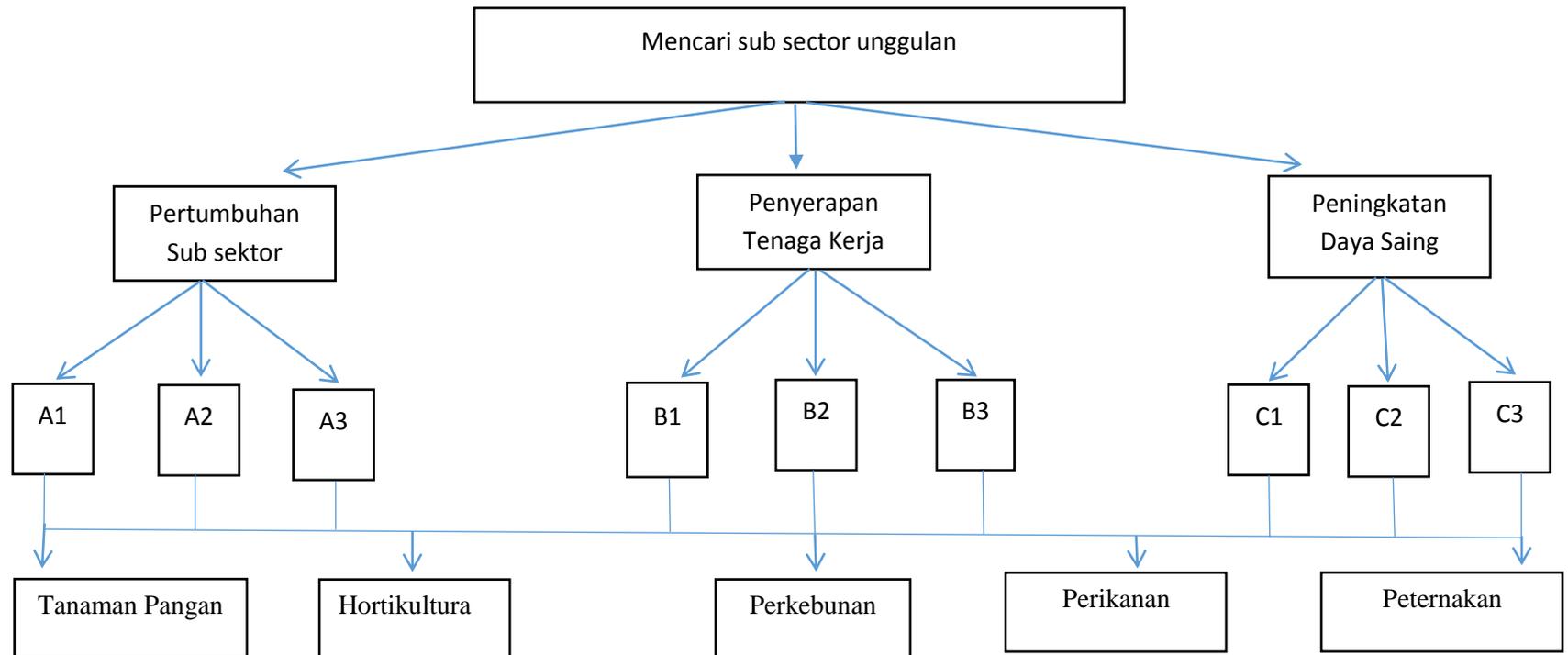
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• AHP menunjukkan bagaimana menghubungkan elemen-elemen dari bagian lain untuk memperoleh hasil gabungan. | |
|---|--|

Sumber : (AHP, Bambang Permadi : 97-100)

f. Model Analisis Penyusunan Hierarki

Model penyusunan hierarki yang digunakan dalam penyusunan alternative penentuan sub sektor unggulan adalah :

Gambar 3. 2 Model Penyusunan Hierarki AHP



Keterangan :

A1 : Bahan Baku

A2 : IPTEK

A3 : Mutu Tenaga Kerja

B1 : Nilai Produksi

B2 : Upah

B3 : Nilai Investasi

C1 : Infrastruktur

C2 : Birokrasi

C3 : Sumber Daya Manusia

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kriteria Pertumbuhan subsektor, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing untuk menentukan subsektor unggulan dari sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara.

Kriteria pertumbuhan subsektor merupakan kriteria yang dipilih untuk menentukan subsektor unggulan karena pertumbuhan subsektor merupakan indikator yang menunjukkan bahwa subsektor merupakan komoditas yang mengalami kenaikan kapasitas produksi. Terjadinya pertumbuhan subsektor jika komoditas tersebut mampu memberikan kontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan daerah yang ditandai dengan kenaikan pendapatan wilayah.

Kriteria penyerapan tenaga kerja merupakan kriteria kedua yang digunakan sebagai penentu subsektor unggulan dari sektor pertanian. Jika subsektor dari sektor pertanian tersebut mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dari yang lainnya artinya subsektor tersebut telah mampu mengurangi masalah krusial daerah yaitu pengangguran yang dapat berdampak pula dalam mengurangi angka kemiskinan. Dengan demikian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat tercapai.

Kriteria peningkatan daya saing digunakan sebagai penentuan subsektor unggulan dari sektor pertanian karena jika suatu subsektor

memiliki tingkat daya saing yang tinggi artinya subsektor tersebut termasuk dalam kategori komoditas yang kompetitif dan siap untuk bersaing dengan komoditas lain di tingkat domestic maupun internasional. Selain itu, subsektor yang memiliki nilai daya saing mampu menarik minat investor untuk berinvestasi pada subsektor tersebut yang kemudian berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan serta pertumbuhan daerah.

Adapun rincian kriteria dan beberapa alternative kriteria dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pertumbuhan Sub Sektor, yaitu proses perubahan kondisi Sub Sektor suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dapat juga diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi sub sektor yang ditandai dengan kenaikan pendapatan wilayah.

1. bahan baku, bahan baku merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Bahan baku disini merupakan sumber daya yang digunakan untuk diolah menjadi barang produksi, disebut juga sebagai modal.

2. IPTEK, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan mampu mendorong adanya percepatan proses pertumbuhan dan pembangunan.

3. Mutu Tenaga Kerja, tenaga kerja merupakan subjek pembangunan yang berkompetensi untuk melaksanakan proses pembangunan.

Kualitas tenaga kerja sebagai sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan dan pembangunan.

b. Penyerapan Tenaga Kerja, erat kaitannya dengan banyaknya sektor mampu menampung tenaga kerja yang tersedia dalam wilayah tersebut.

1. Nilai Produksi, merupakan keseluruhan jumlah barang yang merupakan hasil akhir proses produksi yang selanjutnya akan dijual. Apabila permintaan hasil produksi naik, maka produsen akan menambah penggunaan tenaga kerja, begitu sebaliknya.

2. Upah, perubahan tingkat upah yang diberikan akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi yang selanjutnya akan berdampak pada banyak sedikitnya permintaan tenaga kerja. Jika tingkat upah naik akan berdampak pada naiknya biaya produksi yang selanjutnya akan meningkatkan pula harga perunit barang sehingga konsumen akan memberikan respon dengan mengurangi konsumsinya karena mahalnnya harga selanjutnya target produksi akan turun yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan.

3. Nilai Investasi, adanya investasi artinya terjadi penanaman atau pengeluaran modal yang digunakan untuk proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa serta untuk menambah kemampuan

memproduksi barang dan jasa yang tersedia. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya penyerapan tenaga kerja.

c. Peningkatan Daya Saing, daya saing pada dasarnya merupakan kemampuan untuk menumbuhkan sebuah daya tarik dan iklim yang produktif untuk kegiatan perekonomian. Dengan kata lain, daya saing juga diartikan sebagai kemampuan wilayah untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relative tinggi.

1. Infrastruktur, ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan kunci kelancaran kegiatan usaha. Ketersediaan infrastruktur baik dari segi kualitas dan kuantita sangat berpengaruh pada iklim investasi wilayah sehingga akan berpengaruh pula pada tingkat daya saing wilayah tersebut.

2. Birokrasi, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdampak pada berbagai kebijakan birokrasi yang dibuat. Dengan demikian peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dengan system birokrasi dan regulasi yang dibuat.

3. Sumber Daya Manusia, SDM sangat erat kaitannya dengan ketersediaan tenaga kerja. Namun, Sumber Daya Manusia yang mampu meningkatkan daya saing bukan hanya dari segi kuantitas

namun kualitas untuk mampu memberikan inovasi-inovasi kegiatan usaha dan teknologi sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif.

